



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. NHK : 666571

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 543.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di POLEWALI MANDAR
, HASIL SENDIRI Rp. 60.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di POLEWALI MANDAR
, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/120 m2 di POLEWALI
MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 247.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 20.150.000

1. MOTOR, HONDA NC11CIC A/T (SCOOPY) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.950.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 155.285.225

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 723.735.225

III. HUTANG Rp. 5.195.549

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 718.539.676

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.